

**ANALISIS PROSEDUR PELAKSANAAN PENAGIHAN PPh BADAN
DENGAN SURAT PAKSA, GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

IKA APRILIANAWATI
B 20006 0194

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern seperti sekarang ini pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi perhatian utama yang ditangani, ada beberapa cara untuk mengembangkan perekonomian diantaranya adalah dengan pemungutan pajak pada setiap penduduk. Dikarenakan pajak mempunyai pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi di setiap negara, baik negara yang sedang berkembang seperti Indonesia maupun di negara-negara maju. Pajak mempunyai peran penting untuk pertumbuhan ekonomi maupun kepentingan sosial pada setiap negara, dan dengan pajak pula suatu negara mampu meningkatkan kemakmuran yang adil dan merata bagi setiap penduduknya. Untuk itu Pemerintah selalu berupaya untuk membuat Peraturan Pajak dengan sedemikian rupa melalui usaha-usaha yang dilakukan sehingga mampu meningkatkan perekonomian melalui sektor pajak. Realisasi penerimaan pajak 5 tahun terakhir ini selalu mengalami pertumbuhan lebih dari 18% kecuali tahun 2009, yang hanya 4,38% (dari www.pajak.go.id). Setiap negara yang ingin terus memajukan perekonomiannya harus tetap melaksanakan pemungutan pajak meskipun dengan adanya pemaksaan seperti adanya Surat Paksa yang mewajibkan semua penduduk membayar pajak dengan tepat waktu.

Surat Paksa menurut Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan. Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajak setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran. Bersamaan dengan penyampaian Surat Paksa tersebut Wajib Pajak dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp25.000,00 Wajib Pajak wajib melunasi utang pajak dalam waktu 2x24 jam. Sedangkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) sendiri adalah Pajak yang dibebankan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Badan adalah Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi PT, CV dan sebagainya. Jadi PPh Badan adalah Pajak yang dipungut atau dibebankan oleh suatu badan usaha atas penghasilan yang diterimanya dalam suatu tahun pajak (Waluyo, 2006).

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan menggunakan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada Penanggung Pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh Jurusita Pajak pusat maupun daerah. Jadi, Surat Paksa dalam proses penagihan tunggakan pajak

mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut (Ketut Bagiarta, 2007).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi KPP adalah melakukan pengumpulan data dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak, penelitian dan panatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak, penerimaan Pajak, penagihan, penerapan sanksi perpajakan, serta pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (dari www.pajak.go.id). Dengan demikian KPP mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Dengan terlaksananya tugas dan peranan dari KPP maka akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. Perkembangan jumlah tagihan pajak secara nasional dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pemenuhannya. Hal ini bisa terjadi karena dalam proses penagihannya terdapat beberapa hambatan yang masih terjadi, misalnya beberapa alamat Wajib Pajak tidak ditemukan, Wajib Pajak tidak mau bekerja sama dalam proses penagihan, serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan Wajib pajak tentang pembayaran pajak (Megga Putri Sasanty, 2008). Realisasi penagihan

pajak selama 2 tahun terakhir secara nasional yaitu Rp12,6 triliun tahun 2008, sedangkan tahun 2009 sebesar Rp22,6 triliun (dari www.pajak.go.id).

Masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya Utang Pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, merupakan pertimbangan khusus tentang keluarnya UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan Utang Pajak oleh Wajib Pajak (Yenni Chrisyanti, 2008). Dengan adanya peraturan-peraturan tentang tindakan penagihan dengan Surat Paksa didalam UU, maka akan mencegah adanya kehendak kepada pihak pembayar untuk tidak memenuhi kewajibannya. UU penagihan pajak ini diharapkan akan memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan yang dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah, tidak memihak, adil serasi, selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum (Waluyo, 2006).

Megga Putri Sasanty (2008) melakukan penelitian tentang penagihan pajak PPh Badan dengan Surat Paksa guna meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target penagihan PPh Badan dengan Surat Paksa belum sesuai dengan jumlah keseluruhan Surat Paksa cair, walaupun proses

penagihannya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh UU Perpajakan.

Yenni Chrisyanti (2008) melakukan penelitian tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Rungkut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak aktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, namun tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban pajaknya masih relatif rendah, sehingga diharapkan adanya tindakan tegas oleh Aparat Pajak untuk menindak Wajib Pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dengan memperhatikan penelitian Megga Putri Sasanty (2008) dan Yenni Chrisyanti (2008), penulis tertarik melakukan penelitian tentang prosedur pelaksanaan penagihan PPh Badan dengan Surat Paksa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada periode pelaksanaan penelitian dan obyek penelitian. Penelitian ini menganalisis tunggakan pajak tahun 2009, sedangkan Megga Putri Sasanty (2008) menggunakan data tunggakan pajak tahun 2008. Selain itu, pada penelitian ini melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yenni Chrisyanti (2008) di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut.

Dengan berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan melihat arti pentingnya pemungutan pajak maka penelitian memutuskan mengambil judul

“ANALISIS PROSEDUR PELAKSANAAN PENAGIHAN PPh BADAN DENGAN SURAT PAKSA, GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penagihan Pajak PPh Badan dengan Surat Paksa di KPP Pratama Surakarta ?
2. Apakah pelaksanaan penagihan Pajak PPh Badan dengan Surat Paksa telah dilaksanakan sesuai prosedurnya?
3. Apakah penagihan Surat Paksa sudah mampu meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta?

C. Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah Laporan Kegiatan Penagihan Pajak KPP Pratama Surakarta untuk Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2009.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penagihan Pajak PPh Badan dengan Surat Paksa di wilayah KPP Surakarta.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan penagihan Pajak PPh Badan dengan Surat Paksa dibandingkan dengan prosedurnya di KPP Pratama Surakarta.
3. Untuk mengetahui kemampuan penagihan pajak PPh Badan dengan Surat Paksa dalam peningkatan penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Supaya dalam pemungutan Pajak yang dilakukan menjadi lebih mudah, dengan adanya Surat Paksa. Dengan demikian tidak ada lagi keterlambatan yang melebihi ketentuan pembayaran Pajak.
2. Bagi masyarakat/peneliti lain
Dapat dijadikan sumber informasi tentang pemungutan Pajak PPh Badan dengan Surat Paksa, dan dapat dijadikan bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian berikut.

F. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika pembahasan skripsi mengenai Analisis Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak PPh Badan Dengan Surat Paksa, Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pertama ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian kedua ini pembahasannya meliputi kajian pustaka yang meliputi teori-teori yang melandasi serta menunjang penelitian ini, antara lain: definisi perpajakan, fungsi pajak, tata cara pemungutan pajak, wajib pajak dan penanggung pajak, prosedur pemungutan pajak, sarana penagihan pajak, jadwal waktu tindakan penagihan, sanksi terhadap wajib pajak, pengertian pajak PPh badan, macam-macam pajak PPh badan, serta penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ketiga ini dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang prosedur pelaksanaan penagihan pajak PPh badan dengan surat paksa guna meningkatkan penerimaan pajak di KPP pratama surakarta.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bagian penutup yang berupa kesimpulan akhir dari penelitian yang dilaksanakan, keterbatasan penelitian dan saran-saran penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.